



TIONGKOK SERAHKAN PERALATAN LAB ANTI-NARKOTIKA KEPADA ZIMBABWE

Menteri Dalam Negeri dan Warisan Budaya Zimbabwe, Kazembe Kazembe (kiri) berjabat tangan dengan Dubes Tiongkok untuk Zimbabwe, Zhou Ding usai serah terima peralatan laboratorium anti-narkotika di Harare, Zimbabwe, Kamis (18/1). Tiongkok memberikan peralatan laboratorium narkotika kepada Kepolisian Zimbabwe untuk mendukung perjuangan melawan penyalahgunaan narkoba dan zat terlarang.

NATO akan Gelar Latihan Militer Terbesar Melibatkan 90 Ribu Personel Tentara

Masyarakat di negara NATO perlu mempersiapkan diri menghadapi potensi perang.

BRUSSELS(IM) – Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan menggelar latihan militer terbesar dalam kurun lebih dari tiga dekade pada pekan depan. Sebanyak 90 ribu tentara bakal dilibatkan dalam latihan tersebut.

Panglima Tertinggi Sekutu NATO Eropa, Jenderal Christopher Cavoli, pada Jumat (19/1) mengungkapkan, latihan tersebut mengusung tema “Steadfast Defender 2024”.

Digelar hingga akhir

Mei, latihan itu akan melibatkan unit-unit dari 31 negara anggota NATO, plus calon anggota, yakni Swedia.

Latihan tersebut, yang terdiri dari serangkaian latihan individu yang lebih kecil, akan berlangsung dari Amerika Utara hingga sisi timur NATO, dekat perbatasan Rusia. Sebanyak 50 kapal angkatan laut, 80 pesawat, dan lebih dari 1.100 kendaraan tempur bakal dikerahkan selama Steadfast Defender 2024 berlangsung. “Aliansi akan

menunjukkan kemampuan untuk memperkuat kawasan Euro-Atlantik melalui pergerakan kekuatan transatlantik dari Amerika Utara,” ujar Cavoli, dikutip laman i24News.

Terakhir kali NATO menggelar latihan berskala besar adalah pada era Perang Dingin, yakni tahun 1988.

Ketua Komite Militer NATO, Laksamana Rob Bauer, mengatakan Steadfast Defender 2024 merupakan demonstrasi kesiapan baru aliansi tersebut. “Ini adalah rekor jumlah pasukan yang dapat kami bawa dan lakukan latihan dalam jumlah tersebut, di seluruh aliansi, melintasi lautan, dari AS hingga Eropa,” katanya.

Bauer juga memper-

ingatkan, masyarakat sipil di negara-negara anggota NATO perlu lebih mempersiapkan diri menghadapi potensi perang di masa depan dengan Rusia.

“Kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup dalam damai dan itulah mengapa kita punya rencana, itulah mengapa kita bersiap menghadapi konflik,” katanya.

“Kami tidak mencari konflik apa pun, namun jika mereka menyerang kami, kami harus siap,” tambah Bauer.

Menurut Bauer, kekuatan darat Rusia telah terdegradasi parah akibat perang di Ukraina. Namun dia mengakui angkatan laut dan udara Rusia masih memiliki kekuatan cukup

besar.

Bauer mengatakan, upaya Moskwa untuk menyusun kembali pasukannya terhambat oleh dampak sanksi Barat. Kendati demikian, Kremlin masih berhasil meningkatkan produksi artileri dan rudal.

Terkait konflik di Ukraina, Bauer mengatakan bahwa meskipun pertempuran sengit masih terjadi, garis depan “tidak banyak bergerak”.

“Meskipun serangan-serangan terbaru Rusia sangat menghancurkan, serangan-serangan tersebut tidak efektif secara militer,” ujarnya, seraya menyerukan para pendukung Ukraina untuk tidak “terlalu pesimis” terhadap prospek Kiev tahun ini. ● tom

Korut Uji Coba Senjata Nuklir Bawah Laut

PYONGYANG(IM) – Pemerintah Korea Utara (Korut) mengklaim telah melakukan uji coba “sistem senjata nuklir bawah laut” di perairannya pekan ini.

Uji coba itu dimaksudkan menanggapi latihan gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) bersama Korea Selatan (Korsel) dan Jepang, yang melibatkan kapal induk bertenaga nuklir AS.

Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (19/1), Kementerian Pertahanan Korut dalam pernyataan yang dirilis kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) menyebut latihan gabungan itu “sangat mengancam keamanan” Pyongyang, sehingga sebagai tanggapannya dilakukan uji coba di Laut Timur.

“(Korut) Telah melakukan uji coba penting terhadap sistem senjata nuklir bawah laut ‘Haeil-5-23’ yang sedang dikembangkan di Laut Timur Korea,” sebut Kementerian Pertahanan Korut dalam pernyataannya yang dirilis KCNA.

Tanggal pasti uji coba itu tidak diungkapkan oleh Pyongyang.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Korut, dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters, menuduh AS, Korsel dan Jepang telah “menjadi panik” dengan latihan militer, dan memperingatkan “konsekuensi bencana” untuk latihan gabungan semacam itu.

Angkatan Laut ketiga negara yang bersekutu itu menggelar latihan gabungan selama tiga hari hingga Rabu (17/1) waktu setempat, dengan melibatkan sembilan kapal perang termasuk kapal induk AS USS Carl Vinson. Latihan itu disebut bagian upaya meningkatkan respons

terhadap ancaman nuklir dan rudal Korut yang terus berkembang.

“Postur perlawanan berbasis nuklir bawah laut dari militer kita semakin disempurnakan dan berbagai tindakan responsif maritim dan bawah laut akan terus menghalangi manuver militer bermusuh dari Angkatan Laut AS dan sekutu-sekutunya,” tegas juru bicara Kementerian Pertahanan Korut tersebut.

Dalam pernyataannya, Pyongyang juga menyebut latihan gabungan AS, Korsel dan Jepang itu menjadi “penyebab semakin tidak stabilnya situasi regional, dan merupakan tindakan yang sangat mengancam keamanan” Korut.

Awal tahun lalu, Korut mengklaim telah menggelar beberapa uji coba drone serangan nuklir bawah laut -- versi berbeda dari Haeil, yang berarti tsunami dalam bahasa Korea -- dan mengklaim drone bawah laut itu bisa memicu “tsunami radioaktif”.

Para analis memperkirakan apakah Pyongyang sungguh memiliki senjata seperti itu.

Uji coba oleh Korut itu digelar saat hubungan dengan Korsel memburuk dalam beberapa bulan terakhir, dengan kedua negara mengakhiri perjanjian-perjanjian penting yang bertujuan mengurangi ketegangan, meningkatkan keamanan perbatasan, dan menggelar latihan tembak di sepanjang perbatasan.

Pekan lalu, pemimpin Korut Kim Jong Un menyatakan Korsel sebagai “musuh utama” negaranya, membubarkan lembaga-lembaga yang berdedikasi pada reunifikasi dan mengancam perang jika terjadi pelanggaran wilayah “bahkan sebesar 0,001 mm”. ● tom

Pria Thailand Dipenjara 50 Tahun karena Kritik Kerajaan

CHIANG RAI(IM) – Seorang pria dihukum penjara 50 tahun karena kritik kerajaan Thailand, sebuah pelanggaran di negara tersebut.

Menurut kelompok hukum Hak Asasi Manusia (HAM), itu menjadi hukuman penjara terberat di bawah peraturan lese-majesty yang ketat di Thailand.

Hukuman itu muncul setelah selama beberapa tahun Thailand meningkatkan penggunaan undang-undang (UU) tersebut terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi.

Menurut kritikus UU tersebut digunakan sebagai taktik untuk membungkam perbedaan pendapat.

Putusan pengadilan di Chiang Rai, menghukum Mongkol Thirakot, mantan aktivis pro-demokrasi berusia 30 tahun, hukuman penjara selama 50 tahun atas postingan di akun Facebook prib-

adinya.

Dikutip dari The Guardian, Kamis (18/1/2024), Mongkol awalnya dihukum 28 tahun oleh pengadilan kriminal.

Namun, ia kemudian ditemukan bersalah atas 11 dakwaan lainnya saat naik banding, yang berujung pada hukuman yang lebih berat.

“Putusan pengadilan menghukum Mongkol Thirakot 22 tahun untuk 112 atas postingan Facebook, sebagai tambahan atas putusan 28 tahun pada pengadilan pertama. Total hukumannya adalah 50 tahun,” ujar pernyataan Pengacara Thailand untuk Hak Asasi Manusi (TLHR).

UU Lese-Majesty, yang membentengi Raja Vajiralongkorn dan keluarnya dari kritik, kerap disebut sebagai 112 di Thailand, setelah bagian yang relevan dari KUHP.

TLHR mengungkap-

kan ini merupakan hukuman terberat karena pencemaran nama baik kerajaan.

Rekor sebelumnya adalah hukuman 43 tahun yang diberikan kepada seorang perempuan pada 2021.

Mongkol, yang memiliki toko baju online, pertama kali ditangkap pada 2021, saat demonstrasi yang meminta agar tahanan politik dibebaskan.

Demonstrasi yang dipimpin pemuda Thailand pada 2020 dan 2021, membuat puluhan ribu remaja turun ke jalan.

Banyak yang meminta agar UU lese-majesty segera diubah.

TLHR mengatakan Mongkol akan mengajukan banding lagi atas putusan tersebut di Mahkamah Agung.

Menurut TLHR, lebih dari 250 aktivis didakwa di bawah UU tersebut sejak gerakan protes dilakukan pada 2020. ● ans



PAMERAN FOTO KETERBUKAAN TIONGKOK DIGELAR DI AFRIKA SELATAN

Pameran fotografi “Era Baru Kita – Vitalitas Kota” diadakan di Cape Town, Afrika Selatan, Kamis (18/1) dengan memamerkan 60 foto. Pameran foto ini menampilkan perubahan kehidupan perkotaan serta pencapaian reformasi dan keterbukaan Tiongkok. Pameran diselenggarakan Federasi Lingkaran Sastra dan Seni Tiongkok dan berlangsung hingga Minggu (21/1).

Gaji Perempuan Jerman 18 Persen Lebih Rendah Dibanding Pria

JERMAN (IM) – Perempuan di Jerman mendapatkan penghasilan rata-rata 18% lebih rendah daripada laki-laki sepanjang tahun 2023, Kantor Statistik Federal Jerman (Destatis) menyampaikan hal tersebut pada Kamis (18/01). Dalam beberapa penyesuaian, kesenjangan bisa menjadi 6%, tambahnya.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa perempuan, rata-rata, menghasilkan 20,84 euro per jam atau setara dengan 22,7 dolar per jam tahun lalu, dibandingkan dengan penghasilan laki-laki untuk waktu yang sama sebesar 25,3 euro atau setara dengan Rp430.482,18 (kurs Rp17.015).

Para ahli statistik telah menghitung kesenjangan upah berdasarkan gender yang menunjukkan perbedaan rata-rata pendapatan kotor antara laki-laki dan perempuan sejak tahun 2006 ketika kesenjangan mencapai 23%.

Perbedaannya terus menurun hingga tahun 2020, menjadi 18%. Angka tersebut tidak berubah sejak saat itu.

Ada juga perbedaan regional di Jerman. Meskipun kesenjangan gaji di Jerman bagian barat mencapai 19%, kesenjangan gaji di negara bagian yang dulunya merupakan bagian dari Jerman Timur yang komunis jauh lebih rendah, yaitu 7%.

Destatis menemukan beberapa alasan mengapa kesenjangan gaji terus berlanjut. Ia mengatakan bahwa penghasilan perempuan mulai stagnan sejak usia 30 tahun, usia rata-rata ketika perempuan di Jerman memiliki anak pertama.

“Hal ini bisa jadi karena perempuan sering menghentikan karir mereka selama masa kerja karena alasan keluarga dan bekerja paruh waktu,” kata lembaga tersebut, mengutip

alasan pengasuhan anak dan tanggung jawab rumah tangga.

Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan karier dan kenaikan gaji perempuan jarang terjadi. Badan tersebut mengatakan bahwa alasan struktural juga dapat berkontribusi terhadap kesenjangan tersebut. Dikatakan bahwa perempuan lebih memungkinkan untuk bekerja di sektor dan profesi yang bergaji lebih rendah dibandingkan laki-laki.

“Mereka juga lebih sering bekerja paruh waktu atau dalam pekerjaan marjinal dibandingkan pria, yang juga terkait dengan pendapatan kotor rata-rata per jam yang lebih rendah.”

Untuk perempuan dan laki-laki yang bekerja dengan jumlah jam yang sama dengan kualifikasi yang sama di jenis pekerjaan yang sama, statistik menunjukkan bahwa perempuan berpenghasilan rata-rata 6% lebih rendah daripada laki-laki.

Kesenjangan upah berdasarkan gender tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga di seluruh Uni Eropa. Di Uni Eropa secara keseluruhan, perempuan dibayar 13% lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama, menurut Komisi Eropa.

Dan upaya untuk menutup kesenjangan ini berjalan lambat. Pada bulan Maret 2020, Komisi Eropa menetapkan strategi untuk mengatasi kesenjangan upah berdasarkan gender pada tahun 2025.

Pedoman Transparansi Gaji diperkenalkan pada Juni 2023, sehingga memungkinkan pekerja untuk menentukan apakah mereka didiskriminasi, atau bagi pemberi kerja untuk memastikan bahwa mereka menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gaji. ● ans

Parlemen Jerman Loloskan RUU Deportasi Pencari Suaka

JERMAN (IM) – Majelis rendah Parlemen Federal Jerman, Bundestag, pada Kamis (18/01) meloloskan rancangan undang-undang yang memungkinkan deportasi lebih cepat bagi para pencari suaka yang ditolak. Langkah ini diambil ketika pemerintahan koalisi Kanselir Olaf Scholz berusaha menangani migrasi yang tidak teratur dan isu-isu terkait.

RUU tersebut telah dihapus dari agenda dalam waktu singkat pada sesi terakhir seminggu sebelum Natal karena salah satu mitra koalisi, Partai Hijau, menuntut perubahan.

RUU tersebut lolos dengan suara dari tiga partai yang berkuasa, termasuk dengan beberapa anggota Partai Hijau yang memberikan suara menentang, sementara partai oposisi Kristen Demokrat menentang langkah tersebut dan mengkritiknya sebagai tidak efektif.

Di antara beberapa langkah dalam undang-undang tersebut salah satunya diulangi Repatriation Improvement Act, adalah ketentuan untuk periode penahanan pra deportasi yang lebih lama, sebagai upaya untuk memberikan lebih banyak waktu kepada pihak berwenang agar dapat menyelesaikan proses sebelum harus membebaskan seseorang.

Durasi maksimum penahanan yang sah sebelum deportasi akan diperpanjang dari 10 hari menjadi 28 hari.

Pihak berwenang akan memiliki lebih banyak wewenang dalam melakukan pengeledahan, misalnya sekarang diizinkan untuk memasuki kamar-kamar di tempat tinggal bersama dan bukan hanya kamar individu yang dideportasi.

Hal ini telah menjadi batu sandungan yang umum bagi pihak berwenang yang gagal melakukan deportasi karena gagal menemukan mereka yang terlibat. Kadang-kadang kurangnya kerja sama dari para migran, yang mungkin tidak mau memberikan dokumen identitas karena mengetahui bahwa hal itu dapat mempersulit proses

pemulangan, juga dapat menunda atau menggagalkan proses tersebut.

Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser mendukung undang-undang tersebut dalam debat Bundestag pada Kamis malam (18/01).

“Kami akan memastikan bahwa orang yang tidak memiliki hak untuk tinggal harus meninggalkan negara kita lebih cepat,” kata Faeser.

Berdasarkan ketentuan tersebut, orang dapat dikeluarkan dari Jerman “lebih cepat dan lebih efisien” oleh negara bagian, papar Faeser.

Faeser mengatakan bahwa para penjahat asing dan mereka yang dianggap menimbulkan ancaman harus dideportasi.

Undang-undang ini juga akan membantu pihak berwenang dalam memerangi kejahatan terorganisir dan khususnya mereka yang terlibat perdagangan orang dan akan meningkatkan hukuman minimum serta maksimum di bidang ini.

Menjelang debat Bundestag, Faeser telah menunjukkan jumlah pemulangan telah meningkat 27% menjadi 16.430 pada 2023 sebagai hasil dari langkah-langkah sebelumnya.

Faeser berharap undang-undang tersebut akan membuat pemulangan “jauh lebih mudah” sekali lagi dan memperkirakan bahwa hal itu akan menghasilkan “sejumlah besar” deportasi tahun ini.

Undang-undang tersebut telah membuat kelompok-kelompok hak asasi manusia, bahkan Asosiasi Pengacara Jerman menyebutnya “hampir tidak masuk akal”.

“Kami merasa ngeri bahwa orang-orang yang melarikan diri dan mereka yang menawarkan bantuan kemanusiaan dapat diancam dengan hukuman penjara,” kata kelompok penyelamat laut SOS Humanity.

LSM tersebut mengatakan bahwa pemerintah Jerman “melanggar janji-janji mereka dalam perjanjian koalisi untuk tidak menghalangi pencarian dan penyelidikan sipil.” Mereka juga menyatakan bahwa dalam beberapa situasi, undang-undang baru ini dapat berarti para relawannya dapat terancam hukuman penjara. ● tom